

**MANAJEMEN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI GERAKAN TERPADU SERENTAK PLUS
(SIGERTAK+) PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Publik**



Oleh :

**Anggi Malendra
NIM. 07011381924219**

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MARET 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**MANAJEMEN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI GERAKAN TERPADU SERENTAK PLUS
(SIGERTAK+) PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

Anggi Malendra

NIM. 07011381924219

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Maret 2023

Pembimbing

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

MANAJEMEN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GERAKAN TERPADU SERENTAK PLUS (SIGERTAK+) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 17 Maret 2023
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

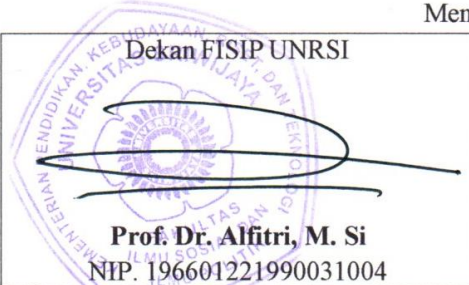

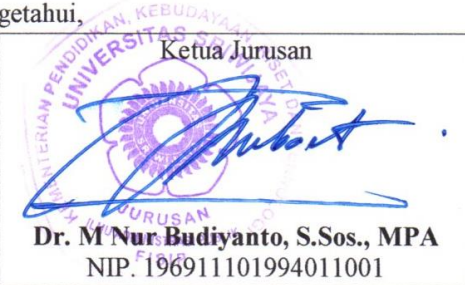

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
Ketua

Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., MAP
Anggota

Annada Nasyaya, S.IP., M.Si
Anggota

Mengetahui,

 <p>Dekan FISIP UNRSI</p>  <p>Prof. Dr. Alfitri, M. Si NIP. 196601221990031004</p>	 <p>Ketua Jurusan</p>  <p>Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p>
---	--

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggi Malendra

NIM : 07011381924219

Tempat dan Tanggal Lahir : OKU TIMUR, 05 Februari 2001

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Manajemen Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gerakan Terpadu Serentak Plus (SIGERTAK+) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 30 Maret 2023
Yang membuat pernyataan



Anggi Malendra
07011381924219

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika sudah mengambil langkah, sesulit apapun tetap jalani.

Harus yakin BADA! pasti berlalu. Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan.”

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tua saya,
Uba dan Umaku.**
- 2. Wanita yang saya cintai “D”**
- 3. Seluruh dosen Ilmu
Administrasi Publik yang saya
hormati**
- 4. Keluarga dan sahabat saya**
- 5. Untuk diri saya sendiri dan
almamater kebanggaan saya
UNSRI**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Manajemen Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gerakan Terpadu Serentak Plus (Sigertak+) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Manajemen Penggunaan Sistem Elektronik penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Bappeda Sumsel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teori fungsi manajemen POSDCORB yang dikemukakan oleh Luther M Gullick antara lain: 1) *Planning*; 2) *Organizing*; (3) *Staffing*; (4) *Directing*; (5) *Coordinating*; (6) *Reporting*; (7) *Budgeting*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak update nya data DTKS yang ada dalam aplikasi Sigertak+. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil temuan dinyatakan bahwa penggunaan aplikasi Sigertak+ belum efektif dan efisien karena fungsi manajemen belum dilaksanakan dengan optimal. hal ini terbukti dari tujuh fungsi manajemen ada satu fungsi yang sudah optimal yakni fungsi perencanaan sedangkan keenam fungsi lainnya tidak berjalan dengan optimal.

Kata kunci: POSDCORB, Sigertak+, Penanggulangan kemiskinan, DTKS, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Pembimbing



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Palembang 30 Maret 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya



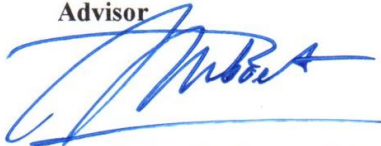
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research is entitled Management of the Use of the Simultaneous Integrated Movement Information System Application Plus (Sigertak+) at the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province. The purpose of this research is to find out how the management of the use of electronic systems for poverty alleviation is managed by the South Sumatra Bappeda. This study uses a qualitative descriptive method, with the theory of POSDCORB management functions proposed by Luther M Gullick, including: 1) Planning; 2) Organizing; (3) Staffing; (4) Directing; (5) Coordinating; (6) Reporting; (7) Budgeting. The problem in this research is that the DTKS data is not updated in the Sigertak+ application. The conclusion of this study is that based on the findings it is stated that the use of the Sigertak+ application has not been effective and efficient because the management function has not been implemented optimally. this is evident from the seven management functions, there is one function that has been optimal, namely the planning function, while the other six functions are not running optimally.

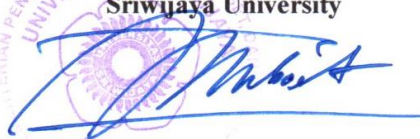
Keywords: POSDCORB, Sigertak+, Poverty alleviation, DTKS, Bappeda South Sumatra Province.

Advisor



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Palembang 30 March 2023
Head of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat dan rahmat serta Kasih Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Manajemen Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gerakan Terpadu Serentak Plus (SIGERTAK+) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**

Tujuan penulisan penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Strata 1 Administrasi Publik di Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua sebagai orang yang terus memberikan dukungan selama proses perkuliahan khususnya selama penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng selaku rektor Universitas Sriwijaya
3. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA selaku dosen pembimbing akademik.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis dimasa yang akan datang.
8. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang senantiasa memberikan data-data dan sekaligus menjadi fokus penelitian skripsi.
10. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang senantiasa memberikan data-data pendukung pada penelitian ini.
11. Dinas Sosial Kota Palembang yang senantiasa meberikan data-data pendukung pada penelitian ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2019 khususnya kampus Palembang, semoga kesuksesan serta keberhasilan menghampiri kita semua.
13. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyelesaian usulan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan usulan skripsi ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan usulan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan. Apabila dalam penulisan masih ada kekeliruan, penulis menerima semua kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini dalam mencapai kesempurnaan. Semoga seluruh bantuan dan partisipasi mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Palembang, Maret 2023

Penulis

Anggi Malendra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	2
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	3
MOTO DAN PERSEMBAHAN	4
ABSTRAK	5
ABSTRACT.....	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR GAMBAR	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan	19
1.4 Manfaat	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Angka Kemiskinan di Sumatera Selatan dan Nasional.....	12
Gambar 2. Halaman Login SIGERTAK+.....	14
Gambar 3. Tampilan Awal Aplikasi SIGERTAK+	16

BAB I

PENDAHULUAN

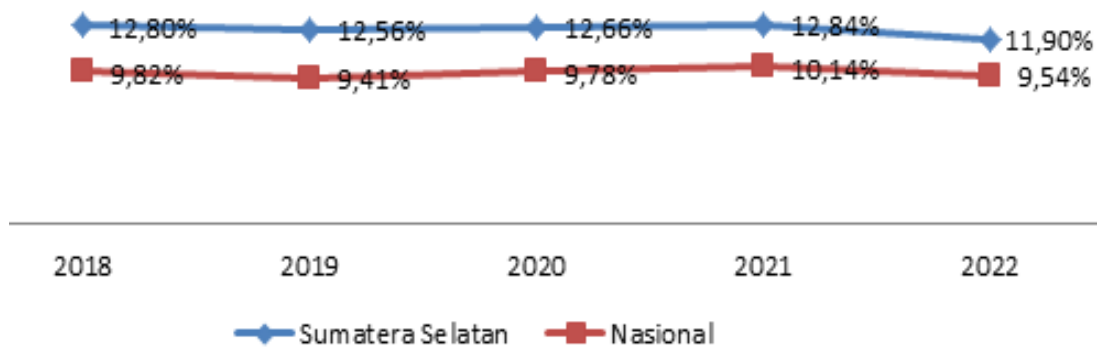
1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Republik Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah satu dari sekian permasalahan yang kompleks dan multidimensi di negara Indonesia dan dalam pembangunan menjadi prioritas utama negara ini. Peran administrasi publik di Indonesia sangat penting. Hal ini muncul dari pernyataan Karl Polang (dalam Pasolong, 2014) yang mengatakan bahwa situasi ekonomi negara sangatlah bergantung pada dinamika administrasi publik. Perkembangan administrasi publik mempengaruhi persepsi tentang peran administrasi publik, terutama mengenai pendekatan proses pengambilan keputusan. Administrasi publik tidak pernah bisa terlepas dari dampak perkembangan lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Keakuratan data kemiskinan merupakan aspek yang sangat penting untuk mendukung strategi dalam penanggulangan kemiskinan (Ferezagia, 2018). Apabila data mengenai kemiskinan sudah tersedia, maka pemerintah bisa dengan mudah dan cepat menentukan keputusan yang tepat. Selain itu, data yang ada juga memungkinkan pemerintah untuk membandingkan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun.

Indikator keberhasilan suatu daerah dalam penanggulangan kemiskinan secara makro dapat diukur dengan persentase/tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin yang datanya secara resmi diterbitkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Terkait dengan hal tersebut, persentase penduduk miskin mengalami

penurunan di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2018 sebesar 12,80% hingga tahun 2022 sebesar 11,90%. Sedangkan Persentase penduduk miskin Nasional tahun 2018 sebesar 9,82% hingga tahun 2022 sebesar 9,54%.

Gambar 1. Capaian Angka Kemiskinan di Sumatera Selatan dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik 2018-2022

Tantangan besar selanjutnya bagi Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan menjadi satu digit pada akhir periode RPJMD 2023. Saat ini, masih ada jarak antara capaian tahun 2018 sebesar 12,80% dengan target RPJMD tahun 2018 sebesar 12,69%, yakni sebesar 0,11% dan target RPJMN tahun 2019 sebesar 7,80% dengan jarak 5%. Jika diasumsikan tingkat penurunan hanya sebesar 0,38% per tahun, maka sulit untuk mencapai target penurunan kemiskinan sebesar 9,20% di tahun 2023 (RPJMD 2023).

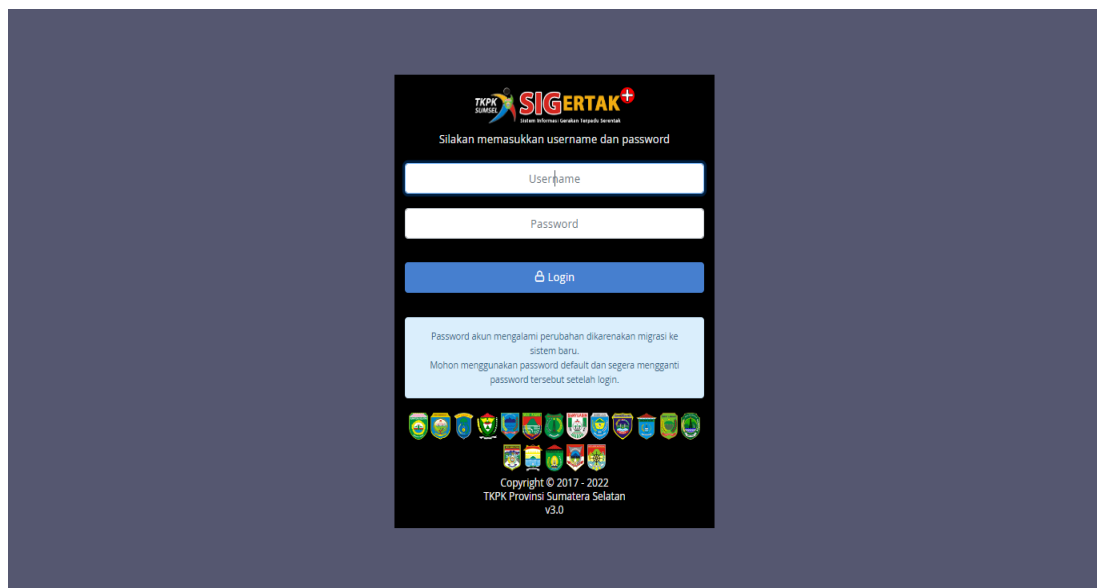
Dalam rangka mengikuti aturan yang diatur oleh Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diwajibkan untuk merencanakan pembangunan daerah berdasarkan pada data dan informasi yang diatur dalam sistem informasi; Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan, yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337), dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 7) maka Bappeda Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sumsel telah melakukan upaya terpadu dan berkesinambungan dengan semua pemangku kepentingan untuk mengentaskan kemiskinan melalui Program GERTAK SEJUTA MANDIRI (Gerakan Terpadu Serentak Semesta Menuju Rumah Tangga Mandiri), sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 36 Tahun 2018. Program ini didasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT) untuk memastikan keberhasilannya secara tepat sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2018, telah dibangun suatu Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan yang diberi nama "SIGERTAK+". Aplikasi ini merupakan sebuah sistem informasi data kemiskinan yang terintegrasi dan terpadu, serta berbasis BDT dengan mengacu pada program inovatif penanggulangan kemiskinan Sumatera Selatan, yaitu GERTAK SEJUTA MANDIRI. SIGERTAK+ dikembangkan menggunakan teknologi website guna mendukung program penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi lebih cepat, mudah, efisien dan tepat

sasaran. Dengan adanya teknologi informasi seperti ini, maka pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Adanya data yang akurat dan terstruktur, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan secara efektif, efisien dan tuntas. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sistem informasi yang menggunakan website sebagai basisnya merupakan sebuah komponen yang dirancang dengan tujuan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat melalui media *online* (Efendi et al., 2020).

Gambar 2. Halaman Login SIGERTAK+



Sumber: Website SIGERTAK+

Alamat SIGERTAK+ dapat diakses pada link <https://sigertak.sumselprov.go.id> seperti yang ada dalam gambar dua. Adapun yang terlibat adalah seluruh pihak, seperti Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan OPD

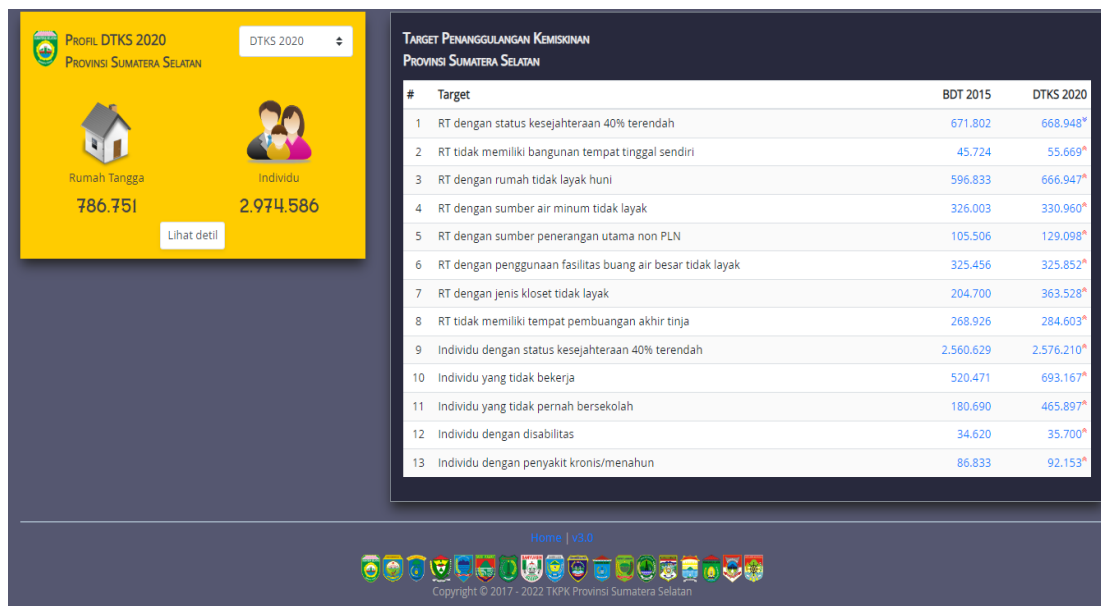
terkait, memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan Aplikasi SIGERTAK+. Pada halaman awal login, terdapat kolom untuk memasukkan username dan password yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi. Namun, akses tersebut hanya diberikan kepada pihak-pihak yang mendaftarkan organisasinya melalui sekretariat Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun aplikasi Sigertak+ ini disebutkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 35 Tahun 2018 merupakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang memetakan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan sasaran variabel kemiskinan yang harus ditanggulangi (dalam bentuk variabel BDT) di Provinsi Sumatera Selatan. Bedanya data ini dengan data BPS adalah pada tampilan data kemiskinan, didalam aplikasi Sigertak+ data ditampilkan dengan tampilan yang menarik dan mudah untuk dibaca karena didalamnya sudah dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis kemiskinan sampai *by name by address* sehingga dapat dilihat sampai foto masyarakat miskin serta alamat dan foto rumahnya. Sedangkan data yang ada di BPS atau di Dinsos merupakan *base data* yang berisi angka dalam tabel-tabel yang menjadi acuan data yang akan ditampilkan ke dalam Sigertak+ dengan tampilan yang lebih mudah di baca. Perbedaan lain terletak pada cara OPD dapat mengambil data DTKS, bagi OPD yang akan mengambil data pada BPS atau Dinsos untuk keperluan program penanggulangan kemiskinan harus memasukan surat permintaan izin mengambil data kepada BPS atau Dinsos tersebut dengan kata lain ada proses surat menyurat dalam pengambilan data tersebut. Sedangkan OPD yang telah terdaftar sebagai pengguna Sigertak+ itu dapat mengambil data DTKS dengan hanya login kedalam aplikasi menggunakan user dan password yang sudah

didapatkan sehingga kegiatan tersebut lebih efektif dan efisien.

Aplikasi ini sudah ada sejak awal tahun 2019, adapun kebijakan yang dibuat dengan menggunakan basis data tersebut adalah merujuk pada kebijakan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 35 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan yang tercantum dalam bagian kedua pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa maksud peraturan tersebut adalah untuk membantu seluruh stakeholder terkait penanggulangan kemiskinan dalam melakukan input/output data, menganalisa dan mengintervensi kemiskinan dengan mudah dan dapat dilakukan dimana saja dengan efektif dan efisien.

Gambar 3. Tampilan Awal Aplikasi SIGERTAK+



Sumber: Website SIGERTAK+

Dapat dilihat dari menu Aplikasi SIGERTAK+ masih menampilkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru tahun 2020 padahal sekarang sudah tahun 2023, oleh karena itu tujuan daripada dibangunnya Sistem Informasi Gerakan

Terpadu Serentak Plus (SIGERTAK+) untuk penghimpunan data kemiskinan dengan tepat dan terstruktur belum terealisasi sehingga pemerintah kesulitan dalam menentukan arah kebijakan terkait upaya pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, masalah yang ditimbulkan akan berdampak pada tidak tercapainya target RPJMD 2023 dengan angka kemiskinan satu digit. Oleh karena itu Stakeholder berkewajiban dalam meng-*update* data yang diperlukan pada menu SIGERTAK+ agar data yang ditampilkan adalah data terbaru dan akurat sehingga upaya penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya penelitian terkait manajemen penggunaan aplikasi berbasis elektronik.

Pada penelitian ini fokus penelitian adalah manajemen penggunaan aplikasi, sehingga yang di manajemen adalah pengguna aplikasinya. Adapun pengguna aplikasi telah tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2018 Pasal 7 yakni: Perangkat daerah pemerintah provinsi, Perangkat daerah pemerintah kab/kota, Swasta dan mitra pembangunan lainnya.

Penelitian terkait dengan penggunaan sistem informasi elektronik sudah banyak di teliti. Beberapa penelitian fokus kepada pelayanan publik seperti penelitian yang dilakukan oleh (Irawan, 2018; Mulyani et al., 2019; Pratama, 2015; Pribadi & Niswah, 2019), beberapa penelitian lainnya fokus pada persoalan peningkatan disiplin kerja atau kinerja karyawan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Lasmaya, 2018; Nasution & Agustina, 2019; Tulodo & Solichin, 2019), beberapa penelitian lain juga fokus kepada penggunaan teori manajemen secara umum seperti penelitian yang dilakukan (Noviana et al., 2015; Putri & Warsono, 2018) menggunakan teori manajemen oleh G.R. Terry yakni empat aspek manajemen terdiri atas *Planning* (Perencanaan); *Organizing* (Pengorganisasia); *Actuating* (Pengarahan); *Controlling*

(Pengawasan) atau disingkat POAC, selain itu ada juga penelitian yang dilakukan Pranalia (2015) menggunakan teori Bartol et al (1996) yang terdiri atas empat fungsi utama yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun penelitian ini fokus pada manajemen yang dikemukakan oleh Luther M Gullick yaitu fungsi manajemen POSDCORB, dengan lokus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini sehingga ada kebaruan didalamnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas diketahui bahwa Aplikasi SIGERTAK+ memiliki kendala DTKS yang tidak *update*. Dengan tidak *update*-nya data yang ada dalam aplikasi tentu merupakan permasalahan dalam manajemen penggunaan aplikasi, karena tidak updatenya data itu merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh penggunaan yang belum optimal, dimana penggunaan sendiri perlu dilakukan manajemen yang baik. Sehingga dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana manajemen penggunaan aplikasi dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu diketahui apa penyebab tidak di *update*-nya informasi DTKS. Hal inilah yang mendorong perlu dilakukannya penelitian terkait Manajemen Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gerakan Terpadu Serentak Plus (SIGERTAK+) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Manajemen Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gerakan Terpadu Serentak Plus (SIGERTAK+) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

Memahami dan menganalisis Manajemen Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gerakan Terpadu Serentak Plus (SIGERTAK+) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi para pembaca. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam hal manajemen penggunaan informasi elektronik.

2. Secara Praktis

Pada penelitian ini manfaat praktis dibagi menjadi tiga manfaat yaitu sebagai berikut:

a. BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan manajemen penggunaan Sistem Informasi Gerakan Terpadu Serentak Plus (SIGERTAK+).

b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi OPD Sumsel dalam penggunaan Sistem Informasi Gerakan Terpadu Serentak Plus (SIGERTAK+) secara optimal.

c. Peneliti

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran terkait manajemen penggunaan aplikasi sistem informasi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda. (2019). *Inovasi Sistem Gerakan Terpadu Serentak Plus*.
<https://sigertak.sumselprov.go.id>
- Bps. (2022). *Persentase Penduduk Miskin Nasional 2018-2022*.
<https://www.bps.go.id/>
- Efendi, A. G., Syahrani, H., & Irawan, B. (2020). Pengelolaan Sistem Informasi Berbasis Website dalam Administrasi Pendidikan Di SMA Negeri 1 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Administrasi Publik*, 8(1), 8879–8891.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6. <https://bit.ly/3w00Aqk>
- Irawan, A. (2018). Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. *Unmus*, 7(1), 20–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35724/sjias.v7i01.967>
- Lasmaya, S. M. (2018). Pengaruh Sistem Informasi Sdm, Kompetensi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 10(1), 25–43. <https://bit.ly/3w9cXNo>
- Mulyani, I., Zamzami, E. M., & Zendrato, N. (2019). Pengaruh Sistem Teknologi Informasi Pada Manajemen Data Dan Informasi Dalam Layanan Keperawatan: Literature Review. *Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(2), 137–142. <https://doi.org/10.35585/inspir.v9i2.2526>
- Nasution, D. A. D., & Agustina, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah-Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Pu*

bl i K, 10(1), 101–114. <https://bit.ly/3w5Essay>

Noviana, R., Sulandari, & Lituhayu. (2015). *Manajemen e-Government Berbasis Web Model Government-to-Citizen (G2C) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah*. 4(3).

<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v4i3.8949>

Pasolong, H. (2014). Teori Administrasi Publik. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. <https://bit.ly/40dVRfj>

Pranalia, D. A. (2015). Manajemen Electronic Government Dalam Pelayanan. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 156–166.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.98>

Pratama, R. H. (2015). Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (E-Rt/Rw). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 2128–2132. <https://bit.ly/3HaFcBy>

Pribadi, F. A., & Niswah, F. (2019). Kualitas pelayanan elektronik cepet mule (cepat, tepat, mudah dan tidak bertele-tele) di kantor kecamatan tulangan kabupaten sidoarjo. *Jurnal Publika*, Vol 9(No 2), 1–7.

<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v7n8.p%p>

Putri, N. O. I., & Warsono, H. (2018). *Manajemen Electronic Government Di Kabupaten Semarang*. 7(2), 1–12.

<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.20105>

Tulodo, B. A. R., & Solichin, A. (2019). Analisis Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi dan Perceived Usefulness terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Care dalam Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk.). *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*

(*JRMSI*), 10(1), 25–43. <https://doi.org/doi.org/10.21009/JRMSI.010.1.02>